

JURNAL

Kajian Stratejik dan Global

Studi Strategik, Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Dan Perkembangannya Di Indonesia

Wan Usman¹

wanusman@yahoo.com

Abstract

This paper concern about the meaning of strategic studies, definition of strategy and its developing meaning up to now. The level of strategic studies in the world generally for master degree and doctor degree. Up to now the objective of strategic study are the strategy to solve the problem of solving the threat of peace, and strategy of solving conflict. In Indonesia, strategic studies known as national resilience, which is to solve the threat of national prosperity and security. The method of solving the problem in research are multidiscipline, interdiscipline and transdiscipline. Finally, this paper explains about the construction of model to measure the national resilience.

Keyword: strategic, national resilience, multidiscipline, interdiscipline and transdiscipline.

Copyright © 2018 Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia. All rights reserved

¹ Guru besar luar biasa Ekonomi dan Ketahanan Nasional pada Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia

1. Pendahuluan

Bagian ini mengawali pembahasan dengan mengantar pada pengertian mengenai studi atau kajian strategik dan baru pada bagian berikutnya akan dipaparkan tentang konteks historisitas yang muncul dalam kaitannya dengan kajian strategik. Kajian strategik atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Strategic Studies* memusatkan perhatian pada masalah strategi mengatasi konflik dan mengatasi gangguan perdamaian. Yang menjadi fondasi secara akademik dari kajian ini adalah geografi, penduduk, serta sumber daya alam yang bersifat relatif statik dan dipadukan dengan unsur-unsur yang bersifat dinamik yaitu politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan intelijen. Kata strategik sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *strategos* atau jenderal. Pada masa itu, bangsa Yunani kuno, diketahui kerap kali berperang, antara Athena melawan Sparta. Dalam konteks itu hanya jenderal yang mengetahui cara memenangkan peperangan. Pada dunia Timur tercatat 400 tahun sebelum Masehi, telah ada seorang jenderal bernama Sun Tzu yang menulis sebuah buku ternama, *The Art of War* (Seni berperang). Sun Tzu secara prinsip memiliki anggapan bahwa membunuh itu adalah berdosa, maka lumpuhkanlah musuh dengan strategi yakni cara terbaik dalam melumpuhkan musuh. Pada masa sekarang, strategi dikaitkan dengan kondisi non-perang, seperti halnya perencanaan, yang berarti perencanaan jangka panjang, industri strategik yang artinya industri yang memproduksi alat-alat keperluan militer seperti tank, pesawat udara, senjata, dsb.

Sementara, isu-isu strategik dimaknai sebagai isu-isu penting. Manajemen strategik berarti manajemen yang dalam prosesnya memperhatikan unsur-unsur kehidupan manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kata strategi selalu harus diartikan dalam kaitannya dengan suku kata berikutnya. Kata strategi dengan demikian dapat diartikan sebagai cara terbaik mencapai tujuan.

2. Perkembangan Kajian Strategik

2.1. Tingkat Studi

Pada level apa Kajian Strategik ini diajarkan? Pada umumnya pada tingkat magister (S2) dan doktor (S3). Adakah contoh universitas di luar negeri atau sekolah yang menyelenggarakan program studi ini? Dari pengamatan yang dilakukan ditemukan terdapat setidaknya dua belas perguruan tinggi di seluruh dunia yang menyelenggarakan kajian strategik, diantaranya adalah University of Amsterdam, The University of Exeter, The University of Hull dan University of Leeds yang semuanya berada di Inggris. Adapula University of Rome III di Italia, University of Granada di Spanyol, dan beberapa di Amerika Serikat seperti Georgetown University, John Hopkins University, Temple University, dan Missouri State University. Australia dan Singapura masing-masing memiliki satu perguruan tinggi terkait dengan Studi Strategik yaitu Australian National University dan Rajaratnam School of International Studies.

2.2. Perkembangan di Indonesia?

Di Indonesia semula kajian ini terdapat di Pascasarjana Universitas Indonesia dan Pascasarjana Universitas Gajah Mada, yang dikenal dengan nama Pengkajian Ketahanan Nasional (PKN) pada level program magister (S2).

Setelah berdiri selama tigapuluh empat tahun, Program Pascasarjana Universitas Indonesia berubah nomenklturnya menjadi Sekolah Strategik Ketahanan Nasional, yang menyelenggarakan program pada level Magister dan direncanakan juga pada level Doktor (S3)

2.2.3. Pendekatan yang Digunakan: Monodisiplin versus Multidisiplin, Interdisiplin, Transdisiplin

Selama ini secara umum ilmu pengetahuan cenderung bersifat

monodisiplin, dan telah lama dikenal dan berkontribusi pada masalah-masalah, mulai dari identifikasi hingga penyelesaian yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sebagai contoh dapat disebutkan mulai dari ilmu Astronomi, Ekonomi, Psikologi, Sosiologi, dsb. Ilmu-ilmu yang bersifat monodisiplin ini terus berkembang melalui penelitian-penelitian yang mendalam hingga ke cabang-cabangnya untuk kepentingan kehidupan manusia. Ilmu psikologi sebagai kajian monodisiplin kemudian berkembang menjadi cabang-cabang psikologi seperti psikologi anak, psikologi sosial, psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis, dsb. Begitupula ilmu ekonomi mengalami perkembangan menjadi ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, ekonomi manajerial, dsb.

Paparan di atas menunjukkan perkembangan keilmuan dengan basis pengetahuan monodisiplin. Akan tetapi dalam menghadapi masalah-masalah riil di masyarakat, ditemukan bahwa meskipun pengetahuan monodisiplin itu penting dan hebat, terdapat sejumlah masalah yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pengetahuan monodisiplin saja. Salah satu contoh yang dapat diberikan adalah terkait dengan masalah pembangunan, tidak dapat diselesaikan oleh ilmu ekonomi semata-mata, karena ternyata pembangunan memerlukan investasi untuk pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur masih tergantung pada ganti rugi tanah milik masyarakat setempat. Apalagi kemudian ditemukan bahwa jalan yang akan dibangun melewati tanah yang merupakan makam seorang pemuka agama atau pemuka masyarakat, sehingga sangat besar resistensi atau penolakan yang muncul dari masyarakat setempat.

Menghadapi isu ini, tak mungkin diselesaikan dengan ilmu ekonomi yang terkait dengan prinsip efisiensi semata-mata. Besaran ganti rugi menyangkut tanah milik adat, ataupun memindahkan pemakaman lokal tidak memungkinkan dilakukan, karena terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat setempat.

Untuk itu, dalam masalah pembangunan infrastruktur disadari pentingnya kontribusi ilmu sosiologi dan antropologi, sehingga proyek pembangunan tersebut membutuhkan penyesuaian dari segi penataan ruang yang bersifat melingkar demi menghindari tabrakan dengan pemakaman tersebut.

Pada kasus lain, dengan mengacu pada pengalaman seorang ekonom Belanda yang datang ke Jawa Timur pada 1910. Ekonom tersebut melakukan peninjauan perkebunan tebu (*onderneming*) milik pemerintah Hindia Belanda. Dalam kunjungannya, ia menasehati pemilik *onderneming* tersebut agar upah pekerja lokal yang adalah orang Jawa dinaikkan. Alasan peningkatan gaji tersebut adalah agar mendorong peningkatan produktivitas tanaman tebu sebagai bahan baku pabrik gula. Direktur pabrik gula justru menolak, dengan alasan, "Orang Jawa pandangan hidupnya (pada saat itu) adalah *ono dino ono upo* (ada hari ada nasi) tak perlu kerja keras. Hidup di dunia hanyalah menumpang minum (sebentar), hidup yang abadi itu adalah di hari kemudian (di Surga). Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi yang meletakkan kenaikan upah sebagai komponen yang mendorong peningkatan produktivitas tidak dapat diterapkan pada kelompok masyarakat Jawa pada waktu itu. Kedua contoh ini sekedar memberikan gambaran tentang pentingnya pengetahuan transdisiplin untuk memecahkan masalah pembangunan.

Soedjatmoko, seorang penasehat ahli bidang sosial Bappenas (1971-1980) yang juga pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat (1968-1971) dan pernah menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo, pernah beranggapan bahwa keliru jika memandang pembangunan ekonomi melulu pada hal-hal yang berkenaan dengan soal kebijakan fiskal dan moneter saja (Soedjatmoko, 1981). Masalah kebudayaan dan pembangunan sosial juga mendapatkan tempat dalam pembangunan yang berdimensi ekonomi. Pandangan Soedjatmoko ini menurut hemat penulis merupakan basis pemahaman mengenai

integrasi antara disiplin ilmu ekonomi dengan ilmu sosial, yang dikenal sebagai Transdisiplin.

Terdapat kasus lain yang menarik sebagai bahan diskusi terkait dengan perkembangan integrasi disiplin ilmu, salah satunya terkait dengan masalah pertahanan militer. Dalam menghadapi tentara Jerman yang ingin menguasai negara-negara Eropa dalam Perang Dunia kedua, tentara pada sejumlah negara-negara Eropa mengalami situasi yang berat dan kewalahan karena serangan yang dilakukan oleh tentara Jerman tergolong masif dan kejam. Ratu Wilhelmina dari Belanda bahkan mengungsi ke Inggris pada waktu itu. Satu-satunya harapan untuk membebaskan Eropa dari serangan tentara Jerman adalah Inggris. Tentara Inggris mengerahkan segenap kekuatan dengan mengundang dan melibatkan ilmuwan dari pelbagai disiplin ilmu. Mobilisasi dan pelibatan para ilmuwan dari pelbagai disiplin ilmu ditujukan untuk melumpuhkan dan menghentikan perang dengan biaya sekecilkecilnya. Pada masa itu Inggris dikenal dengan kemampuan angkatan udaranya yang istimewa salah satunya dalam penerbangan jarak jauh.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana dan dimana mengisi bahan bakar sebelum megebom tentara Jerman. Masalah tersebut kemudian diselesaikan oleh seorang pakar matematika dari Amerika Serikat bernama George Bernard Dantzig yang bekerja untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Dantzig mengonstruksikan suatu model matematika linier (*linear programming*) yang mampu mengoptimalkan tujuan dan mempertimbangkan semua kendala yang ada terutama terkait dengan kendala teknis untuk mencapai tujuan dengan biaya minimal. Ilmuwan matematika kemudian meminta bantuan ilmuwan di bidang fisika untuk menetapkan pengisian bahan bakar di udara, tanpa perlu mendarat di suatu negara Eropa Barat, karena begitu mendarat, sangat besar kemungkinan akan berhadapan dengan serangan tentara Jerman. Dengan mengintegrasikan

disiplin ilmu matematika dan fisika, dapat menghasilkan suatu model linear ciptaan Dantzig yang sekarang dikenal dengan *Operation Research*.

Begitu pula halnya dalam kasus polusi air di sungai memerlukan kajian transdisiplin yang mengintegrasikan ilmu biologi, kimia, fisika dan juga ekonomi. Ilmu ekonomi berbicara tentang bagaimana mencapai biaya yang sekecil-kecilnya untuk memenuhi standar BOD, COD, DO, SS, dan sebagainya, pada aliran sungai yang dimanfaatkan oleh petani untuk buangan limbah pupuk pertanian. Pada bagian tengah dipadati oleh limbah penduduk, limbah industri dan pengambilan air bahan baku PAM. Kepentingan-kepentingan ini harus dibuat model pembiayaan yang minim tanpa mengorbankan kepentingan usaha penduduk. Hal tersebut dilakukan dengan mengonstruksi suatu model ekonomi dengan menggunakan prinsip *Operation Research* seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, sehingga kemudian masalah di atas dapat diatasi (Wan Usman, 1983).

Pada kasus lain terkait dengan Kajian Ilmu Kepolisian yang berbicara tentang penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, tidak mungkin dapat menyelesaikan konflik di masyarakat jika hanya mengandalkan disiplin ilmu hukum saja, baik hukum pidana maupun perdata. Dalam menghadapi konflik antara etnis Madura dan Dayak di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat, memerlukan kajian antropologi berupa hukum adat kearifan lokal dan sebagainya.

Dengan demikian terlihat bahwasanya Kajian Ilmu Kepolisian tidak cukup mengandalkan pendekatan monodisiplin, melainkan membutuhkan pendekatan interdisiplin maupun transdisiplin yang mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti manajemen konflik, dsb.

Ilmu Politik yang memanfaatkan ilmu sejarah dalam proses diplomasi luar negeri terjadi ketika Dr. Soedjatmoko yang pada periode Orde Baru

(1969) menjadi duta besar RI di Amerika Serikat, menolak penerapan teori “Domino” yang digunakan oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk “membantu” Vietnam dalam memerangi pengaruh komunis China. Alasan Amerika Serikat mengucurkan bantuan pada Vietnam adalah jika Vietnam jatuh ke tangan komunis, maka berturut-turut negara-negara di sekitarnya seperti Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia, akan jatuh ke tangan komunis seperti layaknya kartu domino yang satu persatu mempengaruhi kartu berikutnya.

Soejatmoko menolak teori domino dengan alasan bahwa dalam sejarah bangsa Vietnam tidak pernah menjadi bangsa yang besar, sehingga mampu memengaruhi keruntuhan bangsa-bangsa lainnya. Indonesia pernah menjadi negara besar pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Oleh karena itu, menurut Soedjatmoko, bukanlah Vietnam yang harus dibantu, melainkan membantu Indonesia dalam memerangi komunis agar negara-negara ASEAN tidak satu persatu jatuh ke tangan komunis. Dari penjelasan ini terlihat bagaimana ilmu politik dan diplomasi luar negeri berintegrasi dengan ilmu sejarah dalam memenangkan diplomasi luar negeri. Inilah merupakan contoh kasus dimana ilmu pengetahuan yang menunjukkan coraknya yang transdisiplin.

Di Institut Teknologi Bandung (ITB) terdapat kajian studi pembangunan yang merupakan studi interdisiplin sehingga dalam mengkaji suatu persoalan dalam studi ini mengambil konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu, kemudian digabungkan menjadi satu. Tujuannya adalah untuk menciptakan satu model solusi untuk menjelaskan persoalan ini. Teknologi erat kaitannya dengan pengembangan. Pembangunan merupakan upaya menambahkan variabel baru, membuat variabel baru atau gabungan dari keduanya terhadap suatu konsep yang sudah ada. Bentuk konsep yang sudah ada merupakan

variabelvariabel/unsur-unsur yang mempunyai korelasi tinggi (ITB, Mata kuliah sistem pembangunan, 2015).

3. Pendekatan Yang Dibutuhkan pada Masa Kini: Multidisiplin, Interdisiplin, Transdisiplin

Berikut ini merupakan penjelasan tentang perbedaan masing-masing pendekatan tersebut ditinjau dari segi definisi yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan Definisi antara Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin.

Multidisiplin	Interdisiplin	Trandisiplin
Para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, bekerja bersama-sama untuk sebuah proyek, tetapi dengan pertanyaan penelitian yang berbeda dan kesimpulan juha berbeda.	Para peneliti berinteraksi dengan tujuan dari transfer pengetahuan, dari satu disiplin ke disiplin yang lain. Mengijinkan para peneliti untuk memberitahukan masing-masing pekerjaan dan membandingkan dengan pemenuhan penemuan individu	Colaborasi dalam pertukaran dan mengintegrasikan disiplin-disiplin yang mempunyai tujuan yang sama

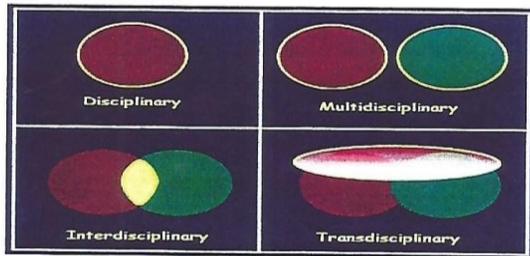
Sumber: Rosenfield (1992)

Dengan merujuk pada perbedaan di atas, dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan di bawah ini yang menunjukkan posisi pengetahuan dan penelitian pada dua kategori pemecahan masalah dan menciptakan pemahaman baru. Dimana terdapat dua pilihan cara yaitu mengintegrasikan dan tidak mengintegrasikan disiplin-disiplin ilmu yang ada. Pendekatan multidisiplin menekankan bahwa seluruh disiplin yang ada bekerja bersama-sama untuk

menyelesaikan masalah, dan dalam prosesnya setiap disiplin ilmu tersebut berada di tempat terpisah tanpa melakukan proses integrasi dalam pemecahan masalah. Sehingga konsekuensi yang muncul hanyalah pada upaya menyelesaikan masalah yang belum terintegrasi

Berbeda dengan interdisiplin dan transdisiplin yang basis pendekatannya adalah mengintegrasikan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu sehingga melahirkan suatu model penyelesaian masalah. Perbedaan diantara kedua pendekatan ini adalah pada konsep kolaborasi keilmuan dan konsep yang kuat pada transdisiplin. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan cara pandang yang berbeda dari pendekatan-pendekatan tsb.

Gambar 2. Perbedaan Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin.



Sumber : Flinterman et al., 2001

Dalam bagian sebelumnya, diutarakan konsep pembangunan ekonomi yang diintegrasikan dengan aspek sosial dan budaya oleh Soedjatmoko, maka berikut ini disajikan bagaimana studi pembangunan di ITB (Institut Teknologi Bandung) membangun pengertian dalam perspektif teknologi. Kajian tersebut merupakan Interdisiplin sehingga dalam mengkaji suatu persoalan dalam kajian ini mengambil konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu kemudian diintegrasikan menjadi satu. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu model solusi untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) (Widyo Nugroho Sulasdi dalam mata kuliah sistem pembangunan 2015).

Kajian strategik Ketahanan Nasional merupakan kajian interdisiplin yang bersifat holistik integral dengan mengintegrasikan dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan

keamanan, yang bersifat dinamis serta terdapat juga tiga aspek yang bersifat agak statis yakni penduduk, sumber daya alam dan geografi. Kedelapan aspek yang terdiri dari lima dimensi yang dinamis. ditambah tiga aspek yang statis amat sulit untuk diintegrasikan karena masing-masing mempunyai tolok ukur yang berbeda. Oleh karena itu penulis cenderung untuk menganggap inti dari ketahanan nasional suatu bangsa ialah mengandung dimensi kesejahteraan dan keamanan (*prosperity and security*).

Ilmu yang terkait dengan kesejahteraan itu mengandung indikator ekonomi seperti pendapatan, lapangan kerja, inflasi, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sedangkan ilmu yang terkait dengan keamanan dengan indikator militer dan nir-militer (kepolisian dan penegakan hukum). Dengan demikian konsep ketahanan nasional itu merupakan integrasi dari kesejahteraan dan keamanan, jadi termasuk ilmu yang bersifat transdisiplin.

4. Peranan Pertahanan dan Keamanan Dalam Studi Strategik Ketahanan Nasional

4.1. Pertahanan Negara

Undang-undang pertahanan yang baru yakni UU No. 03 Tahun 2002, menggantikan UU Pertahanan No. 20 Tahun 1982 dan UU No. 01 Tahun 1988 tentang pertahanan negara. Dalam UU yang termutakhir ini, yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara RI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Hal-hal yang berbeda dari UU baru ini dengan UU yang lama antara lain adalah:

- Komponen utama sistem pertahanan negara adalah TNI (agar sesuai dengan aturan hukum internasional).

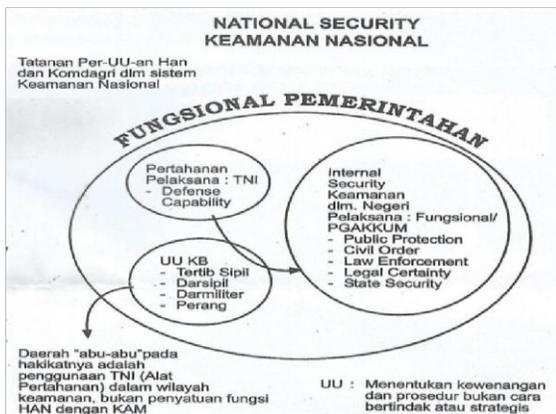
- Polisi dipisahkan dengan pertahanan (polisi hanya mengurus keamanan dan ketertiban umum dan penegakan hukum).
- Terminologi ABRI diganti dengan TNI. Di bawah kekuasaan rezim apapun, negara harus mempertahankan dirinya dengan cara mempertahankan sumber daya nasional yang ada. Untuk melakukan hal itu, suatu sistem keamanan nasional yang efektif bukan hanya untuk kepentingan negara, tetapi juga untuk kepentingan korporasi-korporasi ekonomi untuk mempertahankan eksistensi mereka di tengah-tengah persaingan bisnis yang akan semakin luas. Inggris dan Amerika Serikat menjadi contoh kasus dalam membangun sistem keamanan nasionalnya yang bukan hanya didesain untuk kepentingan negaranya, tetapi juga untuk dengan merujuk pada kepentingan sistem ekonomi kapitalis yang dianutnya.

4.2. Keamanan Nasional (National Security)

Pengertian Ketahanan Nasional dapat dijelaskan dengan bagan 1:

Tatanan Per-UU-an HAN dan Kamdagri dlm sistem Keamanan Nasional

NATIONAL SECURITY KEAMANAN NASIONAL FUNGSIONAL PEMERINTAHAN



Daerah “abu-abu” pada hakikatnya adalah penggunaan TNI (Alat Pertahanan) dalam wilayah keamanan, bukan penyatuan fungsi

HAN dengan KAM
UU: Menentukan kewenangan dan prosedur bukan cara bertindak atau strategis
Sumber: Mabes TNI Cilangkap, 2001

6. 3 Perbedaan Ketahanan dengan Keamanan

Perbedaan Pertahanan dengan Keamanan	
HAN	KAM
<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman dari LN - Metode : Kekerasan Senjata - Sarana Respon : TNI - Tanggungjawab : Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman dari DN - Metode : Penegakan Hukum - Sarana Respon : POLRI - Tanggungjawab : Daerah

Kondisi Pelibatan TNI dalam Wilayah Keamanan

- Terdapat upaya sadar melawan hukum
- Berdasarkan kekerasan senjata
- Memenuhi syarat status pemberontakan
- Pelibatan TNI melalui tahap bantuan militer
- Kewenangan TNI berdasarkan Hukum
- Berdasarkan Keputusan Politik

Sumber: Mabes TNI, Cilangkap (2001)

Ketahanan Nasional

Konsep ketahanan suatu bangsa meliputi semua aspek kehidupan yang secara singkat dapat dikatakan kesejahteraan rakyatnya dan keamanan rakyatnya.

Kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security) merupakan satu mata uang dengan dua sisi yakni kesejahteraan dan keamanan.

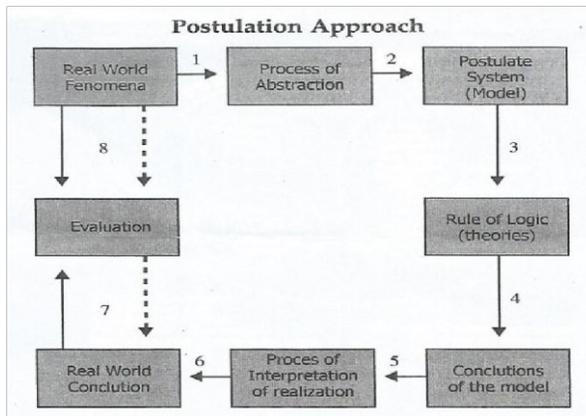
Siapa yang harus disejahterakan dan harus diamankan itu? Jawabannya adalah rakyatnya.

Rakyat di daerah perbatasan dengan negara tetangga pada umumnya belum sejahtera, terbukti dari data statistik menunjukkan bahwa: Rakyat di daerah perbatasan dengan daerah tetangga juga belum aman, terbukti dari masih banyak pencurian ikan, pencurian logging,

penyelundupan dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu penelitian yang mendalam untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan di daerah perbatasan tersebut.

Ancaman dan Sistem Pertahanan Negara

Untuk dapat memahami sistem pertahanan negara Indonesia, dapat digambarkan sebagai gambar berikut:



Sumber: Wan Usman dalam Daya Tahan Bangsa (2008)

Definisi Ancaman

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa (ancaman militer). Ancaman non militer (nir militer) memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yakni tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi dan keselamatan umum.

Ancaman berdimensi Ideologi

Sistem politik internasional mengalami perubahan sejak Uni Soviet runtuh, sehingga paham komunis tidak populer lagi, namun potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi

dapat pula dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan (liberalism) sehingga dapat memicu disintegrasi bangsa.

Ancaman berdimensi Politik

Ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, penanganan lingkungan hidup dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Ancaman berdimensi Ekonomi Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi atas internal dan eksternal. Ancaman internal bersifat inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai serta sistem ekonomi yang tidak jelas. Ancaman dari eksternal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing.

Ancaman berdimensi Sosial Budaya

Ancaman sosial budaya berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, serta konflik horizontal yakni suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Pada tahun 1944 terjadi 18 peperangan dari 23 peperangan yang terjadi di dunia diakibatkan oleh sentimen-sentimen budaya, agama dan etnis. Sementara itu 75 persen dari pengungsi dunia yang mengalir ke berbagai negara lainnya didorong oleh alasan yang sama pula. Sementara itu 8 dari 13 operasi pasukan perdamaian yang dijalankan PBB ditujukan mengupayakan terciptanya perdamaian di berbagai konflik antar etnis di dunia.

Ancaman berdimensi Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, diikuti oleh kejahatan seperti kejahatan cyber dan kejahatan perbankan.

Ancaman berdimensi Keselamatan Umum

Ancaman yang berdimensi keselamatan umum dapat berupa bencana alam, misalnya gempa bumi, tsunami, narkoba, keselamatan transportasi dan sebagainya.

Pergeseran Paradigmatik: Dari Pengkajian Ketahanan Nasional (PKN) Menuju ke Kajian Strategik Ketahanan Nasional
Universitas Indonesia

Dalam bukunya yang berjudul “The Structure of Scientific Revolutions”, Thomas Kuhn (1962) menjelaskan bahwa sejarah perkembangan sains hanya dapat dimengerti dengan baik, tidak dengan cara mendekati sedekat mungkin suatu objek “kebenaran” (*truth*) tetapi dengan cara mendekatinya melalui urutan berbagai paradigma. Tiap periode mempunyai paradigma tersendiri yang berakar pada kebudayaan umum dan melalui kebudayaan itu terletak realitas politik, sosial dan ekonomi secara nyata. Paradigma itu sendiri terdiri atas suatu himpunan asumsi yang didefinisikan tidak hanya apa yang diketahui, tetapi juga sifat pengetahuan itu sendiri, bukan hanya jawaban terhadap pertanyaan, tetapi juga menjelaskan jenis pertanyaan yang sah untuk dijawab; bukan hanya hasilnya, melainkan juga metode yang digunakan untuk mencapai hasil itu. Secara singkat, apa yang dapat dan tidak dapat dimasukkan sebagai “kebenaran” merupakan tugas dari sains. Meskipun demikian, kebenaran yang objektif sulit dicapai dan mungkin juga tidak ada.

Pendidikan di Indonesia yang terdiri atas jenjang strata satu (S1), strata dua (S2) dan strata tiga (S3) pada hakikatnya mengikuti

pendekatan ilmu pengetahuan (*scientific approach*) seperti dilakukan *The Founding Fathers of Classical Natural Science*, Francis Bacon (1561-1621), Descartes (1596-1650) dan Newton (1642-1727), dimana jenjang S1 menitikberatkan pada aksiologi (nilai kegunaan suatu ilmu). Jenjang S2 menitikberatkan pada epistemologi (cara mencari kebenaran melalui riset). Jenjang S3 menitikberatkan pada ontologi (hakikat suatu ilmu atau inti suatu objek yang diteliti, yakni menyentuh ruang filsafat). Sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan ada yang mengikuti apa yang disebut *community based approach* (*comprehensively integrated*).

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas sebagai pengantar (*highlight*) ke arah pertimbangan dasar keilmuan Kajian Ketahanan Nasional.

Secara konseptual, Ketahanan Nasional suatu bangsa dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:

- Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar.
- Ketahanan (kemampuan) suatu bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan (*regular*) dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan (*the stability idea of changes*).

Merujuk pada paparan di atas dapat disimpulkan butir (a) di atas untuk menjawab “What it is”, sementara butir (b) di atas untuk menjawab “What should be” dan butir (c) bertumpu pada filsafat alam semesta menurut Rene Thom ahli filsafat alam semesta Perancis yakni fenomena alam itu regular dan stabil dimana di dalamnya terdapat ide tentang

perubahan. Bangsa dan negara dilihat dari segi filsafat alam semesta adalah fenomena alam, jadi ia tunduk pada hukum alam yang teratur dan stabil. Namun demikian, di dalam keteraturan dan stabilitas itu terkandung di dalamnya “*the idea of changes*”.

Dengan demikian, ketahanan nasional dapat didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya, di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada.

Dari definisi ini tersirat di dalamnya bahwa Ketahanan Nasional itu dapat berupa kondisi dinamik suatu bangsa, serta dapat pula merupakan metode untuk mencapai tujuan (*means and ends*) agar tetap jaya. Sebagai metode, bersifat multidisiplin, interdisiplin maupun transdisiplin.

Jika Ketahanan Nasional merupakan sebuah kajian, maka pertanyaan lanjutannya adalah apa yang menjadi objek kajiannya? Yang menjadi objek kajiannya adalah sejumlah hal di bawah ini:

- Keuletan dan ketangguhan suatu bangsa untuk tetap jaya.
- Jatuh banggunya suatu rezim kekuasaan negara.
- Sistem pemerintahan, *nation building*, *nation unity*.
- Pembangunan yang berkelanjutan.

Apakah hanya terkait dengan objek tersebut di atas? Tentu saja tidak, masih terdapat objek lain-lain yang relevan, seperti energi dan sumber daya alam, sains, teknologi dan industri serta isu tentang hak asasi manusia militer, sosial, politik, ekonomi yang mempengaruhi keamanan negara, dan juga tidak kalah pentingnya adalah gerakan radikal yang mengganggu keamanan nasional.

Mempertanyakan apa yang menjadi objek kajian atau hakikat suatu ilmu dalam dunia filsafat ilmu disebut aspek ontologi. Berikutnya muncul pertanyaan mengenai metode apa yang digunakan, dan dalam konteks kajian

seperti di atas semakin nampak bahwa metode yang dinilai relevan adalah metode multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin *comprehensively integrated*, dengan alat analisis Teori Kesisteman dan Modeling. Disiplin yang terkait erat antara lain Geografi, Penduduk, Sumber daya alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan (delapan aspek). Kedelapan aspek ini merupakan komponen-komponen yang dianalisis secara holistik integral. Tiga aspek pertama dianggap statik, sedangkan lima aspek berikutnya bersifat dinamik.

Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan Ketahanan Nasional itu secara benar dalam dunia filsafat ilmu disebut aspek epistemologi.

5. Kendala yang Dihadapi Para Pakar dalam Meneliti Masalah yang Bersifat Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin

Menurut Prof. Higgins, penelitian antardisiplin ilmu atau multidisiplin atau transdisiplin seperti halnya suatu permainan judi (*gambling*) bisa berhasil, bisa pula gagal. Dengan kata lain peluangnya *fifty-fifty*. Berlainan dengan penelitian monodisiplin berpeluang besar untuk berhasil, karena sudah jelas variabel yang di observasi berada dalam satu disiplin ilmu, tanpa khawatir akan adanya kontradiksi.

Penelitian antardisiplin akan berhasil, apabila peneliti (calon doktor misalnya) berhasil memasukkan variabel-variabel yang relevan dari berbagai disiplin ilmu ke dalam model analisisnya. Untuk keperluan ini, pengetahuan yang memadai dalam berbagai bidang ilmu di luar bidang ilmu yang menjadi keahliannya perlu dikuasai. Penelitian multidisiplin yang gagal, apabila peneliti tidak berhasil “menangkap” variabel yang relevan dari berbagai ilmu untuk diikutkan dalam model analisisnya, sehingga mutu penelitiannya kurang berbobot untuk menjelaskan dan untuk melakukan prediksi,

sebagaimana biasanya dituntut oleh seorang yang ingin mendapatkan predikat doktor.

Pada umumnya masalah yang menjadi perhatian untuk dijadikan objek penelitian, bukan saja masalah itu belum pernah terjawab oleh salah satu disiplin ilmu, tetapi juga karena kompleksitas masalah tersebut. Disinilah letak perlunya penelitian antardisiplin ilmu yang menggunakan model sebagai alat analisisnya.

6. Manfaat Keberadaan Kajian Ketahanan Nasional bagi Universitas Indonesia

Program studi dengan kekhususan pada kajian strategik ketahanan nasional dapat meningkatkan citra Universitas Indonesia, baik nasional maupun internasional, karena mempunyai program yang peduli dengan *National-International Prosperity and Security Strategy*. Di samping itu, program ini dapat menjadi media yang efektif bagi bertemunya para pakar dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu, untuk membicarakan isu-isu strategik baik nasional, regional maupun global, mulai dari mengganggu sampai pada mengancam keamanan.

Karena program ini merupakan program yang berbasis multidisiplin, beberapa kalangan pakar mempertanyakan landasan keilmuan serta landasan filosofisnya. Kajian Strategik Ketahanan Nasional terkait dengan “pohon” ilmu yang mana? Mengenai “pohon” ilmu, kajian ini tidak punya “pohon” sebab program ini memang bernaung dibawah “multipohon” ilmu.

Berkenaan dengan isu apakah Kajian Strategik Ketahanan Nasional sebagai ilmu itu diharapkan dapat menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi (*how things actually happen*) yang dalam profesional jargon berarti “ilmu positif” atau apakah kita menganggap ketahanan nasional itu sebagai alat analisis dalam arti diharapkan menghasilkan informasi dari berbagai alternative kebijakan (policies), untuk pembangunan dan keselamatan suatu negara dan

bangsa. Kalau yang terakhir ini yang dimaksud, maka Kajian Strategik Ketahanan Nasional dapat dianggap “ilmu normatif” (*how things should be*). Jika tidak ingin terperosok ke dalam debat antara kedua jargon keilmuan tersebut diatas yakni positif melawan normatif, maka Kajian Strategik Ketahanan Nasional itu (dalam arti luas) merupakan suatu studi tentang bagaimana suatu bangsa dan negara bisa tetap sejahtera dan aman, di tengah-tengah perubahan yang ada baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Perubahan itu dapat berupa gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman, baik yang bersifat *smooth* maupun yang bersifat *catastrophe* (mendadak, shock, krisis).

Sekarang ini umumnya keputusan masyarakat secara eksplisit bersifat multiobjektif. Baik secara tersurat maupun tersirat suatu bangsa menentukan berbagai tujuan melalui pilihan-pilihan tentang cara-cara pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, distribusi pendapatan yang merata, demokrasi di bidang politik, kebebasan, supremasi hukum, sistem pertahanan yang efektif dan sebagainya. Jadi, Kajian Strategik Ketahanan Nasional merupakan suatu kajian yang peduli dengan disain dan evaluasi (dalam arti nasional dan regional bahkan global) dari berbagai alternatif kebijakan pembangunan. Jelas bahwa hal ini tidak dapat didekati oleh satu disiplin ilmu semata-mata.

Mengenai landasan filsafatnya, Kajian Strategik Ketahanan Nasional antara lain dapat bertumpu pada filsafat alam semesta menurut Rene Thom, ahli filsafat alam semesta Perancis abad ke-20, bahwa fenomena alam itu pada hakikatnya regular dan stabil, dimana didalamnya terkandung ide tentang perubahan. Perubahan itu dapat lancar (*smooth*) dan dapat pula bersifat mendadak (*catastrophe*) yakni ketidakstabilan/keruntuhan.

Dengan demikian, Kajian Strategik untuk Ketahanan Nasional suatu bangsa memang mempunyai spektrum yang luas, meskipun demikian, fokus

perhatiannya untuk ketahanan nasional suatu bangsa.

7. Apakah Ketahanan Nasional Merupakan suatu Ilmu?

Jawabannya ialah ya, karena syarat suatu pengetahuan itu terpenuhi yaitu : (1) ada aspek ontologinya yakni objek studinya adalah jatuh bangunya suatu bangsa. (2) ada aspek epistemologi yaitu bagaimana cara mendapatkan ilmu itu, yakni melakukan penelitian antar disiplin, multidisiplin dan transdisiplin. (3) ada aspek aksiologinya, yaitu manfaat ilmu ketahanan itu yakni berguna bagi keutuhan suatu bangsa.

Dengan dipenuhinya aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi, maka strategik ketahanan merupakan suatu ilmu pengetahuan.

8. Bagaimana cara Mengukur Ketahanan Nasional itu?

Cara mengukurnya antara lain sebagai berikut :

(a). Model R.S Cline $P = (C+E+M) (S+W)$

P : Power
C : Critical mass
E : Economics
M : Military
W : National Will
S : Strategy

(b). Model Morgenthau

Ketahanan suatu bangsa dinyatakan sebagai :

$K(m) = f(\text{Unsur stabilitas, Unsur perubahan})$

$= f[(G,A) T,M,D,C,L,O]$

$K(m) = \text{Ketahanan Nasional } f =$

Fungsi G = Geografi
A = Sumberdaya alam
T = Kemampuan industri
M = Kemampuan militer
D = Kemampuan Demografi
C = Karakter nasional
L = Moral nasional
O = Kualitas diplomasi

Referensi

- Ball, D and Horner, D. 1992. *Strategic Studies in a Changing World*. Canberra: The Australian National University
- Dantzig. *Operation Research*. Gray, Colins S. 1982. *Strategic Studies and Public Policy: The American Experience*. Lexington University Press of Kentucky,
- Haffa, Robert P, Jr. *Rational Methods, Prudent Choices: Planning US Forces*. National Defense University Press, Washington DC, 1988.
- ITB. Mata Kuliah Sistem Pembangunan. 2015
- Kennedy, Paul. 1987 *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*. New York: Random House
- Kuhn, Thomas. 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: Chicago University Press
- Luttwak, Edward N. 1991. *Strategy: The Logic of War and Peace*. Massachusetts: Harvard University Press,
- Mabes TNI Cilangkap. *Perbedaan Pertahanan dengan Keamanan*. 2001.
- Rosenfield. 1992. *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin*.
- Soedjatmoko. (1971-1980); (1968-1971) (1981)
- Sterman J.D. *System Thinking & Modelling for a Complex World*. McGraw Hill Comp. Inc., 2000.
- Sun Tzu. 1998. *The Art of War (Modul Manajemen Strategik oleh Wan Usman)*. 1998.
- UU Nomor 03 Tahun 2002 menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan UU Nomor 01 Tahun 1988 tentang Pertahanan Negara
- Wan Usman. *Jurnal Ekonomi Keuangan Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1986.